

BAB III

KIPRAH KEPEMIMPINAN INDONESIA DI INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA)

Dalam sejarah Indonesia, kita mengenal bahwa Kerajaan Sriwijaya pernah menguasai lautan di Asia Tenggara bahkan sampai ke Madagaskar pada abad 7 Masehi. Demikian pula masa Majapahit dan Bugis yang pernah menguasai seluruh laut nusantara. Malahan Kerajaan Bugis pernah mengeluarkan Kitab Hukum Pelayaran dan Perdagangan *Amanna Gappa*. Pada waktu yang sama di Eropa, Kerajaan Romawi telah menguasai pula laut tengah. Akan tetapi kesemuanya itu hanyalah berdasarkan penguasaan secara *de facto* dan tidak secara *de jure*. Penguasaan secara dimaksudkan agar kerajaan – kerajaan itu dapat perlindungan pelayaran dari gangguan bajak laut di wilayah masing masing. Dari perkembangan tersebut bangsa Romawi menganggap laut sebagai hak bersama seluruh umat atau *res communis omnium*, di mana penggunaan laut dapat di lakukan secara bebas atau terbuka bagi setiap orang. Dalam hal ini Kerajaan Roma merupakan pihak yang menjamin kepentingan umum di laut dan penggunaannya. Selain itu, muncul pula pandangan *res nullius*, yang menganggap laut tidak ada yang memiliki, oleh karena itu siapa pun yang dapat menguasai laut dapat pula memilikinya dengan mendudukinya berdasarkan konsepsi *occupatio*. (Dam, 2010)

Di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia mempunyai fokus yang lebih terhadap masalah maritim ini di buktikan dengan kebijakan Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

A. Kepimpinan Indonesia di IORA

Indonesia secara resmi memegang keketuaan IORA periode 2015 – 2017 dengan Afrika Selatan sebagai Wakil Ketua pada Pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke – 15 di Padang. Indonesia adalah satu-satunya ketua IORA yang

menetapkan tema selama masa kepemimpinan, yaitu *"Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean"*. Gagasan dan prakarsa strategis Indonesia pada masa keketuaannya yang telah disetujui: (i) membentuk IORA Concord sebagai outcome strategis 20 tahun IORA; dan (ii) penyelenggaraan KTT IORA (one-off) pada Maret 2017. Dalam kapasitasnya tersebut, Indonesia menetapkan prioritas untuk memperkuat regionalisme di kawasan Samudera Hindia melalui pembentukan IORA *Concord*, pengarusutamaan gagasan Poros Maritim Dunia, memajukan kerja sama IORA dan isu lintas sektoral dan melanjutkan penguatan institusi. Selama masa kepemimpinannya, Indonesia berkomitmen untuk mengadakan program kegiatan konkrit bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga RI terkait, yaitu: (i) The 3rd Indian Ocean Dialogue; (ii) International Symposium "IORA 20th Anniversary: Learning from Past and Charting the Future"; (iii) IORA Business Innovation Center (BIC); (iv) IORA Guide for Investment; (v) The 2nd Blue Economy Conference; (vi) Regional Workshop: "Interseksi Kebudayaan dan Peradaban di Samudera Hindia"; dan (vii) IORAG Cultural Expo. (Tim Kemlu, 2017)

Sejalan dengan program pemerintahan Joko Widodo 2014 – 2019 yang di jabarkan dalam program nawacitanya, salah satu perhatian pemerintah adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Jokowi menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama, yaitu: (Kementrian Luar Negeri Indonesia, 2014)

- a) Membangun kembali budaya maritim Indonesia.
- b) Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
- c) Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol

laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

- d) Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.
- e) Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritime.



Gambar 3. 1 Pidato Jokowi pada IORA Summit 2017

B. Program dan Kegiatan IORA selama Indonesia Memimpin

Indonesia telah resmi menjadi ketua IORA untuk periode 2015-2017 dengan Afrika Selatan sebagai Wakil Ketua pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-15 di Padang. Organisasi IORA sendiri dalam regionalisme termasuk kedalam organisasi regional berbasis pengelompokan politik.

Dimana IORA ini merupakan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dimana didalamnya banyak terdapat kepentingan. Dalam kepemimpinan Indonesia kali ini, Indonesia merupakan negara pertama yang menetapkan tema dalam keketuannya yaitu “*Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean*”. Dalam masa kepemimpinan Indonesia di IORA, Indonesia memiliki komitmen untuk mengadakan program kegiatan konkrit bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga RI terkait, yaitu:

(i) *The 3rd Indian Ocean Dialogue*

Adapun dalam pertemuan ini dibahas mengenai keadaan Samudera Hindia, dimana dalam forum itu menganggap saat ini negara-negara pada kawasan Samudera Hindia tengah menghadapi berbagai tantangan baru baik itu dalam bidang keamanan maritim dimana didalamnya juga termasuk kejahatan non-tradisional seperti *Illegal Unreported Unregulated Fishing* (IUUF), perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, perdagangan senjata, dll. Oleh karena itu di harapkan dalam forum ini dapat memberikan manfaat bagi perumusan dokumen penting sehingga dapat memperkuat hubungan antara negara-negara anggota IORA. Dalam pertemuan ini mengangkat tema “*Addressing Maritime Security Challenges in the Indian Ocean Through Enhanced Regionalism*” acara ini dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (Kemlu Aspasaf) dan The Habibie Centre (THC). *Indian Ocean Dialogue* (IOD) ini merupakan salah satu pertemuan penting karena dihadiri langsung oleh kalangan pemerintah, akademisi, dan bisnis. Dialog ini dihadiri oleh 80 peserta dari 25 negara yaitu terdiri dari 18 negara anggota IORA. 6 negara *dialogue partners* dan 1 *interested country*. Dialog ini juga menghasilkan *Padang Consensus* yang berisi masukan untuk kerjasama dalam menghadapi tantangan keamanan maritim di kawasan Samudera Hindia.

Adapun yang menjadi pembahasan dalam IOD kali ini ialah berbagai tantangan yang akan dihadapi guna dapat melakukan penguatan regionalisme di kawasan Samudera Hindia. Hal ini sesuai dengan unsur di dalam regionalisme, dimana terdapat kehendak untuk membangun masa depan bersama dari penduduk yang mendiami suatu wilayah yang merupakan suatu komunitas yang memiliki rasa solidaritas yang erat dengan tujuan baik itu secara ekonomi, politik, dan kultural. Selain itu, dibahas pula mengenai banyaknya kerugian yang dialami pada sumberdaya kelautan diakibatkan tindakan IUUF. Sehingga pada IOD kali ini diharapkan IORA sendiri dapat menerapkan langkah-langkah untuk menindaklanjuti secara serius permasalahan IUUF ini. Dalam forum tersebut menganggap bahwa perlu diadakannya kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum, pentingnya setiap Negara-negara anggota IORA untuk melakukan pertukaran dan koordinasi informasi di antara pemangku kepentingan dan melakukan *joint inspection and surveillance scheme*. Selanjutnya dibahas pula mengenai upaya untuk melakukan peningkatan kerjasama antar Negara-negara anggota IORA mulai dari aspek *strategic security* (kerjasama militer) dan *sub-strategic security* (kerjasama sipil keamanan non-tradisional). Dan bagaimana kemungkinan Angkatan Laut (AL) dari Negara-negara IORA dapat melakukan kerjasama untuk memastikan keamanan dan keselamatan maritim. Dimana hal ini juga berguna untuk menjamin akses terhadap energi, dan bagaimana pentingnya kerjasama energi terbarukan antar negara anggota. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016)

(ii) *International Symposium “IORA 20th Anniversary: Learning from Past and Charting the Future*

Dalam kegiatan symposium ini mengungkapkan bahwa *Ocean Rim Association* (IORA) hingga saat ini telah mencatat sejumlah prestasi. Organisasi ini telah berubah menjadi wadah kerjasama yang penting pada kawasan Samudera Hindia. Selain karena Samudera Hindia memang kawasan yang strategis, IORA telah memiliki banyak anggota dan mitra dialog yang semakin menunjukkan eksistensi IORA di kancah dunia

internasional. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota IORA dan jumlah Negara yang menjadi mitra wicara. Walaupun peningkatan yang terjadi tidak signifikan tetapi terdapat perbedaan yang terjadi ketika IORA pertama kali dibentuk hingga kepemimpinan Indonesia saat ini. Simposium ini dilaksanakan di Yogyakarta pada 14–15 September 2016 dan menghasilkan “*Yogyakarta Message*”. Acara ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan pertukaran pandangan tentang bagaimana seharusnya agenda IORA dapat berkembang dan akan menyelesaikan tantangan, peluang, dan strategi yang IORA harus adopsi dalam memproyeksikan masa depan dari IORA itu sendiri. Acara ini diikuti oleh 12 negara anggota IORA dan 6 negara mitra wicara. *Yogyakarta Message* terdiri atas 11 poin yang terbagi dalam tiga bidang utama yaitu Kerjasama Ekonomi, Arsitektur Kawasan Samudera Hindia, dan Sosial dan Budaya. Ketiga bidang dalam *Yogyakarta Message* ini memiliki keselarasan dengan definisi regional yang diungkapkan oleh Mansbaach dimana menurutnya pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional

Dalam bidang Kerjasama Ekonomi terangkum tentang mempromosikan perdagangan dan investasi. Dalam pembahasan kali ini diusulkan bagaimana negara anggota IORA perlu untuk lebih meningkatkan hubungan konektivitas antar negara dengan manfaat mengurangi biaya logistik, mendorong harmonisasi tarif, dan bea cukai, mengintensifkan investasi dalam modal manusia, memajukan pembangunan yang inklusif seperti melalui meningkatkan struktur keuangan mikro dan pemberdayaan UKM serta mempermosikan rantai nilai daerah dengan menekan ke dalam melengkapi antara anggota IORA. Selain itu pembahasan tentang *Blue Economy* perlu di prioritaskan tidak hanya pada sektor perikanan tetapi juga mencakup budi daya bioteknologi kelautan, industri kelautan, energi, pariwisata bahari, dan transportasi laut. Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan perlu lebih

memfokuskan terhadap pembangunan *Blue Economy* hal ini juga terkait dengan bagaimana kedepannya Indonesia ingin menjadi Poros Maritim Dunia. Karena antara konsep *Blue Economy* dan Poros Maritim Dunia memiliki tujuan yang sama dimana ingin menjadikan laut sebagai modal utamanya.

Dalam bidang Arsitektur Kawasan Samudera Hindia dilakukan pembahasan mengenai pemusatan dialog tentang arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, inklusif, dan evolusioner. Serta arsitektur kawasan ini tetap harus berlandaskan pada hukum internasional. Selain itu, pada bidang Sosial dan Budaya di dalam "*Yogyakarta Message*" sendiri tertuang bagaimana seharusnya peran dari negara-negara anggota IORA harus lebih ditingkatkan khususnya menggunakan diplomasi budaya. Hal ini dianggap sesuai dengan salah satu pilar dari Poros Maritim Dunia dimana Indonesia ingin untuk lebih memunculkan ataupun mengenalkan tentang diplomasi maritim. Selain itu pula dianggap bahwa negara-negara anggota IORA ini memiliki warna kebudayaan yang sama namun hanya terdapat keunikan masing-masing yang harus dikomunikasikan satu sama lain. Selain itu dalam bidang ini juga dibahas mengenai pembangunan inklusif yang menjunjung kesetaraan gender, utamanya dalam mengidentifikasi tentang ketenagakerjaan perempuan. Hal ini dikarenakan negara-negara anggota IORA sendiri memiliki jumlah tenaga kerja wanita yang cukup tinggi. Dalam poin ini diharapkan agar wanita sendiri dapat diberikan kualitas tenaga kerja sehingga dapat lebih mampu menyejahterakan keluarganya. .

(iii) IORA *Business Innovation Centre* (BIC)

Program IORA BIC ini di prakarsai oleh Lembaga Ilmu Penelitian Indonesian (LIPI). Adapun latar belakang dibentuknya program ini karena IORA memiliki 3 pilar yaitu forum akademisi, forum bisnis, dan *Working Group on Trade and Investmen* (WGTI). Bagi LIPI sendiri ketiga pilar ini tidak saling menghubungkan satu sama lain yang seharusnya dimana ketiga pilar ini sangat penting dan harus menopang satu sama

lain. BIC ini merupakan rancangan dalam kepemimpinan Indonesia di IORA sekaligus dapat menjadi batu loncatan bagi Indonesia sendiri untuk mewujudkan cita-citanya menjadi Poros Maritim Dunia. BIC ini diharapkan mampu untuk menghubungkan pelaku bisnis dan WGTI ini dengan kalangan forum akademisi yang diharapkan dapat menciptakan suatu penemuan, ide baru, dll. Sehingga kedepannya BIC ini dapat menjadi pilar baru dalam IORA sendiri. Akan tetapi Indonesia sadar akan banyak tantangan yang akan di hadapi, karena membutuhkan persetujuan dari setiap negara anggota IORA. Untuk saat ini, Indonesia dalam setiap pertemuan selalu melemparkan konsep note. Hal ini dapat kita lihat pada *IORAG Meeting* pada tahun 2015 dimana Indonesia telah melemparkan konsep ini di dalam forum dan sedang menunggu respon dari negara-negara anggota IORA. Pada tahun 2016 Indonesia tetap melakukan hal yang sama yaitu melemparkan konsep note karena pada tahun seelumnya tidak banyak negara yang merespon. Dan untuk tahun ini, LIPI sendiri telah mendaftarkan inovasi-inovasi bisnis di kawasan Samdera Hindia khususnya negara-negara anggota IORA. LIPI telah memberikan form ke negara-negara anggota IORA mengenai inovasi bisnis dan sedang menunggu respon dari setiap negara.

(iv) *IORA Guide for Investment*

Dalam pertemuan kali ini yang dilaksanakan di Padang dan adapun hasil dari pertemuan ini adalah IORA sepakat untuk mempercepat implementasi beberapa inisiatif penting terutama peluncuran *IORA Web Trade Repository* dan *IORA Guide for Investment*. *IORA Web Trade Repository* memiliki tujuan untuk mengumpulkan data perdagangan Negara-negara anggota IORA baik secara kuantitatif (nilai perdagangan) maupun kualitatif (kebijakan dan peluang dagang). Adapun *IORA Guide for Investment* bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh terkait peraturan dan kebijakan dalam bidang investasi di setiap Negara-negara anggota IORA. (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2016).

(v) *The 2nd Blue Economy Conference*

Konferensi ini direncanakan akan dilakukan pada Maret 2017 mendatang. *Blue Economy* sendiri merupakan salah satu isu utama di IORA dimana dilakukan pemabahasan mengenai perikanan, budidaya, bioteknologi kelautan, industri kelautan, energi, pariwisata bahari, dan transportasi laut. Seluruh negara-negara anggota IORA melakukan penerapan konsep *Blue Economy* ini. Hal ini dilakukan karena dianggap konsep ini dapat memanfaatkan potensi sumber daya laut baik itu dari segi perikanan maupun energi dapat dilestarikan. Dimana sesuai dengan *Sea Power Theory* dari Mahan dimana peran dari samudera dan lautan di dunia tidak memisahkan daratan, tetapi menghubungkan wilayah yang terhalang oleh laut.

(vi) Regional Workshop: “Interseksi Kebudayaan dan Peradaban di Samudera Hindia”

Acara ini diselenggarakan langsung oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan judul seminar *Regional Workshop* dengan tema *Intersection of Culture in the Indian Ocean Region* yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Jakarta pada 10-11 Oktober 2016. Forum ini merupakan forum pertama yang dihadiri oleh para akademisi di kawasan Samudera Hindia. Dapat dikatakan Indonesia diwakili oleh LIPI menginisiasi forum khusus untuk akademisi ini. (*hasil wawancara dengan Mario Surya Ramadhan, S.Sos, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI pada 16 Januari 2017*) Hal ini erat kaitannya dengan pilar Poros Maritim Dunia yaitu bagaimana Indonesia harus menciptakan budaya maritimnya. Sebagaimana kita ketahui Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang saling berhubungan satu sama lain begitu pula dengan negara-negara di kawasan Samudera Hindia. Kebersamaan dalam suatu kawasan tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara ini memiliki budaya yang berbeda-beda atau mungkin ada memiliki budaya yang sama. Bagaimana masyarakat yang terhimpun dalam IORA ini menggunakan keberagaman ataupun kesamaan budaya untuk

dapat menjadi suatu masyarakat yang dapat menciptakan kedamaian.

(vii) *IORAG Cultural Expo*

Acara ini direncanakan akan diadakan pada bulan Maret 2017. Dimana direncanakan acara ini akan berisi pameran kebudayaan dari negara-negara anggota IORA. Dimana terdapat kesamaan budaya dari negara-negara anggota IORA yang dirasa patut untuk dilestarikan. Selain itu dengan pameran kebudayaan ini juga dapat menambah pengetahuan dan juga rasa keterikatan antar negara-negara anggota IORA.

Selain itu Indonesia juga menyodorkan sejumlah rekomendasi/ inisiatif pada enam area prioritas kerjasama yang telah diusulkan Indonesia pada saat keketuaannya saat ini. Dimana inisiasi Indonesia ini akan dilampirkan sebagai

Code of Conduct dalam *IORA Concord*.

1) Keamanan dan Keselamatan Maritim

Wilayah laut sebagaimana yang diketahui merupakan *tagline* utama dalam kerjasama IORA. Samudera Hindia merupakan salah satu jalur perdagangan yang pastinya memegang peranan penting dalam dunia internasional. Oleh karena itu faktor keamanan dan keselamatan maritim merupakan suatu hal yang dianggap penting untuk senantiasa dijaga demi terciptanya kedamaian dan kelancaran dalam arus perdagangan yang juga dapat mempengaruhi perekonomian dunia. Karena salah satu fungsi dari organisasi internasional sendiri yaitu bagaimana perdamaian dapat diwujudkan melalui wadah kerjasama. Selain itu, terdapat banyak jenis macam kejahatan yang bisa terjadi di lautan menyebabkan kerjasama dalam bidang keamanan dan keselamatan maritim ini merupakan salah satu prioritas utama Indonesia dalam mekanisme kerjasama IORA.

Dalam kepemimpinan Indonesia di IORA, Indonesia menjadikan Bakamla (Badan Keamanan Laut) sebagai *Focal*

Point Pemerintah Indonesia pada sektor keamanan dan keselamatan maritim, berikut merupakan inisiasi dari Indonesia yang akan diinput sebagai *Code of Conduct* dalam IORA Concord, yaitu : (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kawasan Asia Pasifik, 2014, p. 80)

- a. Menciptakan keselamatan dan keamanan serta penegakan hukum di laut dengan cara meningkatkan operasi bersama di kawasan Samudera Hindia, membuat *Standar Operating Procedure* (SOP) terkait dengan penanganan kasus penegakan hukum dan keamanan di laut serta membuat petunjuk batas wilayah antar negara.
- b. Meningkatkan peran Pusat Marabahaya di laut secara terpadu dengan cara mengoptimalkan fungsi Jaringan Radar Pesisir, Penginderaan Jauh Satelit Maritim, Informasi Elektrik Kelautan, *Intergrated Monitoring System Navigation*, serta Observasi Penelitian Kelautan, integrasi sistem antar negara anggota IORA serta *sharing of information* terkait pengelolaan data pelanggaran bidang maritim.
- c. Membangun Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan dengan cara memberikan pelatihan tentang penanganan dan penegakan aspek hukum terkait keamanan dan keselamatan di laut, menciptakan sumber daya manusia yang cakap pada ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan serta Program beasiswa bagi para pegawai dari negara anggotanya.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana kelautan untuk menciptakan kemandirian bangsa dengan cara membangun “*counter issue*/kontra intelijen” tentang keamanan dan keselamatan di laut serta memperkuat IORA melalui *capacity building* para anggota.
- e. Memberdayakan masyarakat pesisir melalui penyuluhan atau bantuan sosial yang terkait dengan keamanan serta keselamatan; pengelolaan sumber

daya yang setara dengan industri serta bantuan pendampingan hukum.

- f. Kerjasama di bidang keselamatan transportasi dengan cara kerjasama penanganan kecelakaan di laut serta investigasi faktor penyebab kecelakaan. *Marine Accident Data Analysis Suite* (MADAS) milik Komite Nasional Keselamatan Transportasi Indonesia (KNKT) kiranya dapat bermanfaat dalam rangka menangani sejumlah kecelakaan yang sering dialami di laut.

Untuk sejauh ini Bakamla telah membangun pangkalan dan dermaga baru di perairan Sabang, Cilacap, Natuna, Balikpapan, Makassar, dan Sorong, serta melakukan pengadaan kapal baru yang dirasa sangat konstruktif untuk mendukung perbaikan dan peningkatan kinerja Bakamla sebagai *Coast Guard*, penjaga perairan Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan asing. (Nainggolan, 2015, p. 28) Hal ini dilakukan sesuai dengan pilar Poros Maritim Dunia yaitu Konektivitas Maritim dan Pertahanan Maritim. Bagaimana Indonesia sendiri dapat melakukan pengembangan infrastruktur untuk kemudian dapat meningkatkan keamanan pada jalur maritim yang dapat menciptakan kedamaian dan kelancaran di laut itu sendiri.

Selain Bakamla yang menjadi *Focal Point* dalam rangka kerjasama keamanan dan keselamatan maritim. Dalam kepemimpinan Indonesia di IORA, Indonesia juga menggandeng TNI Angkatan Laut RI. Kerjasama ini dapat kita lihat dengan terlaksananya *the 2nd International Maritime Security Symposium* dan *the 2nd Komodo Joint Naval Exercise* dengan tema "Peace Keeping Operations". Untuk *the 2nd International Maritime Security Symposium* telah diadakan pada 16 September 2015 di Hotel Borobudur Jakarta. Sedangkan untuk *the 2nd Komodo Joint Naval Exercise* sendiri telah dilaksanakan di Padang pada 12 April 2016.

2) Fasilitasi Perdagangan dan Investasi

Dalam setiap agenda kerjasama baik itu organisasi regional maupun organisasi internasional, isu ekonomi

merupakan suatu hal yang penting begitupun anggapan Indonesia. Indonesia menganggap, IORA memegang peranan sentral dalam penetrasi produk Indonesia ke pasar non-tradisional.

Kontribusi volume perdagangan antar negara IORA (96%) dipengaruhi oleh enam negara utama, yaitu Singapura, Malaysia, India, Indonesia, Australia, dan Afrika Selatan. Volume perdagangan ini dapat terus ditingkatkan melalui serangkaian kebijakan, antara lain asosiasi perdangan (diperkirakan meningkat 22%), *Preferential Trade Agreement* (PTA) (diperkirakan meningkat 11%) dan peningkatan skala ekonomi (diperkirakan meningkat 11%).

Selain perdagangan, pada bidang investasi juga negara-negara anggota IORA merupakan tujuan penanaman modal asing dengan *share* sebesar 13% dari total perdangan asing dunia. Sejumlah gagasan yang diusulkan Indonesia dalam kepemimpinannya di IORA yang berkaitan dengan kerjasama perdagangan dan investasi yang diinput sebagai *Code of Conduct* dalam IORA Concord adalah (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2014) :

- a. Merevitalisasi fungsi *Working Group on Trade and Investment* (WGTI) dan *Indian Ocean Rim Business Forum* (IORBF) yang dianggap sangat penting dalam memajukan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Perhatian perlu diberikan lebih khusus untuk IORBF dari kalangan pengusaha yang selama ini dianggap Indonesia belum aktif.
- b. Pembentukan Gugus Kadin IORA di masing-masing negara anggota untuk lebih meningkatkan peran swasta.
- c. Penerapan IORA *Business Travel Card* untuk memudahkan perjalanan pebisnis di negara-negara IORA. Untuk gagasan ini Indonesia sedang memperjuangkan untuk mendapat persetujuan kebijakan imigrasi sejumlah negara anggota lainnya.

- d. Memudahkan arus perdagangan antar negara IORA dengan melakukan penyederhanaan prosedur bea cukai untuk produk dari negara-negara anggota IORA.
- e. Meningkatkan program pelatihan untuk pemberdayaan pengusaha kecil dan mikro.
- f. Pengembangan konsep *blue economy* sebagaimana yang ditekankan pada pertemuan CoM ke-14 bulan Oktober 2014 di Perth.
- g. Menyusun program kegiatan yang lebih *business-oriented* dalam rangka semakin meningkatkan peran serta pelaku bisnis Indonesia dalam forum IORA, seperti *business forum*, pengiriman *business mission* dan *joint exhibition*.
- h. Mengusulkan pendirian *Business Innovation Centre* (BIC), sebagaimana telah diusulkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada pertemuan *Indian Ocean Rim Academi Group* (IORAG) di Perth tahun 2013. BIC diyakini mampu menjembatani tiga pilar IORA serta melahirkan inovasi bisnis dan IPTEK yang dapat dioptimalkan guna menunjang daya saing ekonomi dan bisnis.

3) Manajemen Perikanan

Manajemen perikanan merupakan suatu tantangan sekaligus kewajiban IORA sebagai suatu organisasi regional pada kawasan Samudera Hindia yang telah dikaruniai potensi sumber daya perikanan yang melimpah. Selain itu pada sektor perikanan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Akan tetapi Indonesia sebagai Negara yang memiliki tujuan untuk menjadi Poros Maritim Dunia, potensi perikanan Indonesia pun saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Aksi pencurian sumber daya laut Indonesia sendiri yang dilakukan oleh pihak asing di tengarai menjadi salah satu penyebab terpuruknya sektor perikanan Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan memperkirakan kerugian Negara sebesar Rp 300 triliun pertahun akibat aksi pencurian ikan. (S E. H., 2012)

Pada saat ini Indonesia menerapkan prinsip-prinsip *Ocean Good Governance*, seperti *Monitoring*, *Controlling* dan

Surveillance (MCS). Hal ini dianggap karena masyarakat dunia saat ini perhatiannya fokus kepada isu pengelolaan dan penangkapan ikan yang berkelanjutan. Karena hal ini pula Indonesia dalam kepemimpinannya di IORA ingin berperan aktif dalam sektor manajemen perikanan.

Dalam fokus kerjasama manajemen perikanan ini Pemerintah Indonesia menjadikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai *Focal Point*, dan Indonesia berhasil memetakan potensi kerjasama didalam kerangka IORA sebagai berikut (hasil wawancara dengan Rita Octafiani, Kepala Sub Bagian Kerjasama Intra Kawasan, KKP pada 13 Januari 2017):

- a. Penguatan pelaksanaan *Port State Measures* dan pertukaran informasi terkait permohonan perubahan bendera kapal dan/atau permohonan otorisasi penangkapan ikan sebagai upaya pemberantasan *Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. KKP juga telah meratifikasi *Port State Measures Agreement* membuktikan KKP mendukung secara penuh pemberantasan *IUU Fishing*. Selain itu juga KKP sendiri memiliki Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dimana system kerjanya yaitu melakukan pengawasan di lautan terkait tindakan *fish crime* dengan menggunakan kapal-kapal pengawas yang dimiliki Indonesia. Indonesia juga telah memperkuat armada lautnya serta memiliki peralatan yang canggih guna memperlihatkan keseriusan Indonesia sendiri dalam mendukung pemberantasan *IUU Fishing*.
- b. Pemberian tanda pada alat penangkapan ikan secara regional berdasarkan standar FAO.
- c. *Pilot Project* penerapan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem. KKP sendiri memiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang) sehingga seluruh pengelolaan perikanan dan pendekatan ekosistem ini diatur oleh Balitbang.
- d. Perlindungan anak buah kapal dari negara-negara IORA. Khusus untuk pembahasan IORA sendiri, IORA tidak memiliki hukum yang pasti terhadap negara-negara anggota

IORA yang melanggar, tidak ada kesepakatan resmi sendiri dari forum IORA mengenai konsekuensi bagi pelanggaran hukum dalam perikanan. Hal ini masih dalam tahap rancangan Indonesia untuk diperjuangkan pada IORA *Concord*

- e. Penguatan mekanisme pengumpulan data armada penangkapan ikan dan data hasil tangkapan berdasarkan system teknologi informasi. Saat ini segala informasi akses untuk Indonesia sendiri telah ada di website resmi dari KKP dan saat ini KKP sedang melakukan penguatan informasi dengan membangun sistem informasi *one data*, dimana semua data KKP tentang perikanan maupun non perikanan dapat dijadikan satu. Untuk saat ini juga data armada penangkapan ikan dan data hasil tangkapan ikan dapat diakses di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT).
- f. Peningkatan keselamatan pelayaran nelayan kecil (*artisanal fishermen*). Dalam hal ini pemerintah telah menyediakan asuransi nelayan, program pemerdayaan nelayan dan subsidi untuk nelayan. Akan tetapi pemerintah Indonesia mengalami sedikit kendala mengenai subsidi untuk pemberdayaan nelayan kecil dikarenakan WTO. Hal ini dikarenakan menurut WTO sendiri segala macam bentuk subsidi perikanan baik itu untuk nelayan kecil maupun besar adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
- g. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia di Bidang Pengelolaan Perikanan melalui; (i) pendidikan formal; (ii) pendidikan non-formal, seperti pelatihan penanganan ikan yang baik di atas kapal; dan (iii) *awareness building program* (penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan). Untuk pendidikan formal KKP sendiri memiliki Sekolah Tinggi Perikanan dan untuk pendidikan non-formal sendiri KKP telah mengikuti workshop mengenai “*IORA ISDP Trainer’s training programme on Marine Aquaculture*” yang diadakan di Antananarivo, Madagaskar pada 2-3 Mei 2016.

Selain itu Indonesia dalam kepemimpinannya di IORA telah mengusulkan sejumlah gagasan untuk meningkatkan kerjasama di sektor *fisheries management* yang akan diinput sebagai *Code of Conduct* dalam IORA Concord sebagai berikut (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2014, p. 84) :

- a. Merevitalisasi IORA *Fisheries Support Unit* (FSU), baik secara *by-law* atau program, guna menjangkau lebih banyak bantuan dana dari pihak luar. FSU juga dianggap penting dalam upaya meningkatkan kerjasama dengan *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC).
- b. Meningkatkan kapasitas di bidang pemerantasan *illegal, unreported unregulated (IUU fishing)* terkait penerapan *market-related measures* oleh Negara tujuan ekspor seperti *catch certificate* dan *labeling*.
- c. Meningkatkan penerapan *Fishing Management in Areas Beyond National Jurisdiction*.
- d. Meningkatkan kerjasama teknik erupa pelatihan di bidang perikanan yang saling menguntungkan, khususnya di bidang-bidang yang menjadi keunggulan Indonesia maupun yang di harapkan Indonesia dapat belajar dari pihak lain yang lebih maju.

4) Manajemen Risiko Bencana Alam

Pembahasan mengenai bencana tidak hanya dibatasi pada bencana alam saja. Terdapat juga bencana akibat ulah manusia yang dapat timbul baik itu dari individu, kelompok, atau keijakan pemerintah yang salah. Sebagaimana telah tertulis dalam kesepakatan kerjasama di bidang *disaster response and risk management* di dalam Dokumen *Perth Communique of the 13th Meeting of the Council of Minister of the IORA*, Negara-negara anggota IORA memilki kesepakatan untuk mengadakan kerjasama di bidang ini. Salah satu fokus utama dari kesepakatan kerjasama ini ialah penanganan tsunami, *search and rescue* (SAR) serta *oil spills*.

Fokus kerjasama IORA pada bidang ini menjadi sesuatu yang menarik bagi Indonesia, dimana Indonesia

memiliki pengalaman dalam menangani risiko bencana alam salah satu yang terbesar adalah tsunami yang terjadi di Aceh. Karena hal ini maka di Indonesia sendiri telah didirikan *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)* pada tahun 2011 di Jakarta.

Karena alasan inilah sehingga sudah sepatutnya Indonesia untuk memperjuangkan bagaimana Indonesia dapat menjadi pusat manajemen risiko dan mitigasi bencana regional (*Capital of Disaster Risk Management*). Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga yang dapat diandalkan dalam penanganan bencana yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tidak hanya BNPB, Indonesia juga memiliki pusat-pusat kajian bencana yang tersebar di universitas di nusantara yang telah diakui dunia internasional. Selain itu Indonesia juga mendapatkan penghargaan *Global Champion of Disaster Risk Reduction* yang telah diberikan oleh Sekjen PBB yaitu Ban Ki-Moon kepada Presiden Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono pada saat acara KTT ASEAN pada 9 November 2011 di Bali, hal ini merupakan salah satu kebanggaan dari Indonesia sendiri dan bagaimana Indonesia kedepannya dapat lebih baik dalam melakukan manajemen bencana alam.

Dalam kepemimpinannya di IORA, maka Indonesia khususnya dalam bidang manajemen risiko bencana alam telah merumuskan suatu gagasan kerjasama yang akan diinput sebagai *Code of Conduct* dalam *IORA Concord* dalam bentuk : (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2014, p. 85)

- a. Penentuan *focal point* dimasing-masing negara sebagai suatu langkah pragmatis membangun jalur komunikasi bila terjadi bencana.
- b. Pembentukan rezim hukum internasional yang mengatur pencemaran laut lintas batas yang selama ini belum ada.
- c. Mendorong kerjasama erta anatara IORA dan *AHA Centre*.

- d. Apabila IORHADR dapat terwujud, mendorong partisipasi aktif dan luas dari seluruh negara anggota IORA.
- e. Mengusulkan Indonesia sebagai ibukota *Disaster Risk Management* di kawasan Samudera Hindia dengan pendirian *IORA Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management* yang bermarkas di Indonesia.

5) Akademisi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam organisasi IORA tidak hanya melibatkan tokoh pemerintah maupun pebisnis, tetapi para akademisi juga turut masuk didalamnya. Hal ini dikarenakan pendidikan dirasa sangat penting tidak hanya untuk individu tetapi untuk semua kalangan. Di IORA sendiri cakupan untuk bidang ini cukup banyak terdiri dari *Indian Ocean Research Group (IORG)*, *Regional Centre for Science and Transfer of Technology (RCSTT)*, *University Mobility in Indian Ocean Rim (UMIOR)*. Akibat banyaknya bidang yang bergerak pada pendidikan menyebabkan tumpang tindihnya lembaga-lembaga ini.

Khusus untuk Indonesia sendiri dalam kepemimpinannya di IORA menjadikan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai *focal points* dalam sektor kerjasama bidang ini. Kemristek sendiri telah menggelontorkan dana sebesar Rp 200 juta untuk mealkukan penyelenggraan *one-day seminar* terkait isu kerjasama bidang akademisi dan IPTEK. Selain itu untuk LIPI sendiri telah menyatakan kesiapannya mewujudkan Indonesia sebagai *centre excellence*, diantaranya melalui pengelolaan *world class facilities for biodiversity and life science*.

Dalam kepemimpinan Indonesia di IORA pada bidang ini Indonesia menawarkan konsep pengembangan kerjasama dengan gagasan yang akan diinput sebagai *Code of Conduct* dalam IORA Concord sebagai berikut: (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2014, p. 87)

- a. Perlu penyederhanaan dan restrukturisasi kelembagaan di IORA yang menangani sektor *academic, science and technology*. Sebaiknya pengelolaan tugas dan fungsi dari semua lembaga tersebut lebih diperjelas guna menghindari duplikasi lebih lanjut.
- b. Kerjasama akademis, ilmu pengetahuan dan teknologi kiranya dapat diarahkan pada penelitian dan pengembangan sektor teknologi kelautan. Kegiatan sebelumnya yang pernah dilakukan seperti lokakarya pemberdayaan perempuan, pelatihan sidang WTO, pemanfaatan teknologi untuk pengusaha kecil serta pemberantasan kemiskinan, menurut Indonesia tidak terlalu relevan dengan portofolio IORA. Indonesia mengharapkan pada masa mendatang, kerjasama kiranya dapat diarahkan pada topik-topik seperti penyulingan air laut menjadi air tawar, konservasi biologi dan ekosistem laut, pola cuaca, kenaikan permukaan air laut, pemanfaatan daerah pantai, perubahan iklim, teknologi energi terbarukan dari laut dan konsep *blue economy* atau *ocean economy*.
- c. Mendorong pendirian *centre of excellence* di Indonesia serta di negara anggota lainnya yang memiliki minat atau kemampuan dibidang tertentu. Saat ini, Sri Lanka sudah menunjukkan minatnya untuk mendirikan *IORA Centre of Excellence on Ocean Sciences and Environment*, sementara Seychelles sudah mengajukan pendirian *Hub for Environmental Research (Marine and Terrestrial) for the Western Indian Ocean*. Selain itu, sebagai tindak lanjut kerjasama IORA dengan *International Renewable Energy Agency (IRENA)*, Indonesia juga perlu mendorong pendirian IORA *centre of excellence* di bidang energi terbarukan
- d. Mendorong kerjasama dan pertukaran ilmuwan/peneliti di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama serta tidak berpotensi membahayakan keamanan negara.

- e. Kerjasama saling bertukar informasi mengenai kurikulum pendidikan diantara sesama negara anggota IORA.

Khusus untuk dukungan LIPI terkait perannya sebagai focal point IORA untuk bidang ini dan sebagai dukungan LIPI terkait keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka LIPI telah melakukan beberapa usaha baik itu yang bersifat penelitian maupun non-penelitian yang telah dimulai sejak tahun 2015 sebagai berikut: (hasil wawancara dengan Mario Surya Ramadhan, S.Sos, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI pada 16 Januari 2017)

Tahun 2015

LIPI melakukan kegiatan riset dalam rangka menyusun background paper hal ini dianggap penting dikarenakan menurut LIPI sendiri IORA untuk sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan suatu yang baru, selain itu belum banyak juga yang mengetahui dan memahami IORA ini merupakan bentuk kerjasama seperti apa. Karena alasan inilah maka LIPI melakukan penelitian untuk menyusun background paper mengenai pilar-pilar poros maritim yaitu infrastruktur, budaya maritim, dan ekonomi didalam kerjasama kawasan Samudera Hindia. Sehingga LIPI membuat enam Background paper terkait dengan topic kebencanaan, keamanan maritim, diplomasi maritim, ekonomi dan interseksi budaya. Berikut judul-judul Background Paper yang telah dibuat

- Disaster and Climate Change in the Indian Ocean Region oleh Laksmi Rachmawati
- Indonesia's Maritime Diplomacy in the Indian Ocean Region Cooperation Strategy and Priority oleh Adriana Elizabeth dan Rizka Fiani Prabaningtyas
- Indonesia's Fisheries Management in the Eastern Indian Ocean Region
- Intersection of Culture and Civilization of the Indian Ocean States: Indonesian Perspective oleh Amorisa Wiratri, Angga Bagus Bismoko dan Dedi Supriadi Adhani

- Maritime Security in the Indian Ocean Region oleh Riefqi Muna dan Mario Surya Ramadhan
 - Pemetaan Dinamika Perdagangan dan Investasi di Negara-negara Anggota di Indian Ocean Rim Association (IORA) oleh Panky T. Febiansah
- b. LIPI mewakili Indonesia sebagai chair dalam acara 21st Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG) Meeting yang diadakan di Padang pada 19-22 Oktober 2015. Adapun ibu Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc. berperan sebagai chair dan Head of Delegation dari Indonesia di wakili oleh bapak Dr. Zainal Arifin, M.Sc.
 - c. Karena menurut LIPI sendiri IORA merupakan isu yang baru dan belum terdapat komunitas akademik yang khusus membahas kajian Samudera Hindia, maka LIPI mengumpulkan para akademisi yang memiliki perhatian lebih terhadap isu kemaritiman khususnya pada kawasan Samudera Hindia. LIPI telah melakukan beberapa kali melakukan diskusi akademik mengenai Samudera Hindia seperti di beberapa tempat sebagai berikut ; International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) yang bertempat di Aceh, Pusat Kajian Samudera Hindia yang bertempat di Universitas Andalas, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan yang bertempat di Institut Pertanian Bogor, dan Pusat Studia Asia Pasifik yang bertempat di Universitas Gadjah Mada. Jadi LIPI tidak hanya melakukan penelitian semata, tetapi LIPI juga melakukan kegiatan non-penelitian untuk membangun kembali kepedulian masyarakat Indonesia khususnya di kalangan akademisi yang belum terlalu mengetahui tentang Samudera Hindia.
 - d. LIPI mengadakan kegiatan seminar nasional yang pertama yang bertemakan “Samudera Hindia Kawasan Masa Depan Dunia” yang dilaksanakan di Auditorium Utama LIPI, Jakarta pada 30 September 2015. Dan seminar nasional kedua LIPI mengadakan kerja sama dengan IORAG Indonesia dengan tema “Interseksi Kebudayaan dan Perdaban di Samudera Hindia” dilaksanakan di Jakarta pada 21 Desember 2015.

- e. Selain itu LIPI dan Komite Kerja Nasional IORAG membuat *Executive Summary* yang berjudul Kerjasama Kawasan Samudera Hindia dalam Perspektif Maritim Indonesia. LIPI mengangkat topik ini karena interaksi antara masyarakat di kawasan Samudera Hindia bukanlah sesuatu yang baru dari hasil kajian ini di temukan bahwa interaksi antara masyarakat kawasan Samudera Hindia telah berlangsung lama. Hal ini dapat dilihat dari interaksi kerajaan Sriwijaya, terdapat banyak pedagang-pedagang dari Arab maupun Tiongkok yang datang ke Indonesia, dan masyarakat Indonesia yang pada saat dahulu melakukan pelayaran sampai ke Madagaskar. Hal inilah yang menjadikan LIPI mengangkat topik ini karena interseksi kebudayaan dianggap dapat menjadi pondasi yang kuat bagi keberlangsungan kerjasama di kawasan Samudera Hindia.

Tahun 2016

- a. LIPI juga melakukan kegiatan non-penelitian dengan mengadakan lomba esai nasional dengan tema *Diversity, Community, Cooperation: Cultural Intersection in the Indian Ocean Rim*. Antusias peserta untuk lomba ini dinilai lumayan besar yaitu terdapat 30 esai dari mahasiswa S1, 15 esai dari mahasiswa D3, dan 16 esai dari dosen dan mahasiswa pascarsajana yang diadakan pada bulan Maret 2016. LIPI melakukan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian publik terhadap kajian Samudera Hindia.
- b. Kementerian Luar Negeri RI rutin melakukan *Ministrial Meeting* yang diadakan tiap tahun pada bulan Oktober. Untuk forum IORAG sendiri dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta sedangkan *Ministrial Meeting* dilaksanakan di Bali. Peran Indonesia sama setiap tahunnya yaitu pertemuan ini berisi evaluasi program-program IORA.

Tahun 2017

- a. LIPI sedang melakukan penelitian mengenai *Blue Economy* karena tahun ini akan dilaksanakan *International Ministerial Meeting* mengenai *Blue Economy*.
- b. LIPI memiliki komitmen untuk mempublish *Journal of Indian Ocean Region* yang pada awalnya jurnal ini dikelola oleh *Focal Point IORAG* Australia akan tetapi untuk tahun ini jurnal tersebut diambil alih oleh LIPI, sehingga LIPI yang mendanai serta menyeleksi naskah-naskah yang akan muncul pada jurnal ini.

6) Pariwisata dan Pertukaran Sosial-Budaya

Pariwisata memiliki dampak khususnya dalam perekonomian suatu negara tidak hanya bagi negara tuan rumah, tetapi juga negara asal para turis. Salah satu motivasi utama suatu negara fokus untuk melakukan promosi pariwisata terhadap negaranya adalah timbulnya kemajuan dalam bidang ekonomi. Selain itu pertukaran sosial-budaya memiliki manfaat yang besar bagi dunia internasional dimana dengan dilakukannya pertukaran sosial-budaya suatu masyarakat dapat mengenal sosial-budaya masyarakat negara lain yang dapat memiliki efek saling mengerti diantara satu sama lain sehingga dapat terwujudnya suatu perdamaian dunia. Karena hal inilah sektor pariwisata dan pertukaran kebudayaan menjadi salah satu area yang penting bagi Indonesia dalam kepemimpinannya di IORA. Sejarah yang kuat dan warisan budaya yang beragam juga menjadi keuntungan sendiri bagi Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisatanya.

Sektor pariwisata merupakan salah satu kontributor utama perekonomian Indonesia. Pada tahun 2013, Indonesia kedatangan 8.802.129 wisatawan mancanegara (tumbuh 9,42%) dengan perolehan devisa sebesar USD 10,05 miliar. (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2014) Namun demikian angka ini masih jauh dibawah jumlah wisatawan yang

dimiliki Negara anggota IORA seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia bagaimana Indonesia dapat lebih meningkatkan sektor pariwisata dan pertukaran kebudayaan karena diketahui Indonesia banyak memiliki kelebihan tersendiri dalam bidang ini. Adapun pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara yakni mencapai angka 10.406.759 jiwa. Hal ini terus meningkat hingga tahun 2016 Indonesia kedatangan 12.023.971 wisatawan mancanegara.

Terkait dengan keketuan Indonesia dan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam bidang ini Indonesia di bantu dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar) telah mengadakan *Workshop on Cultural Tourism in IORA Countries* yang dilaksanakan di Padang pada 18-19 Oktober 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas isu-isu pariwisata warisan budaya (*Culture Heritage Tourism*), khususnya pengembangan produk yang mempunyai kesamaan (*common products*), pertukaran *best practices* dibidang *Cultural Heritage Tourism*, mempromosikan *Cultural Heritage Tourism* diantara Negara-negara anggota IORA serta mendorong *People-to-People Connectivity*.

Dalam kepemimpinan Indonesia saat ini, Indonesia memiliki beberapa inisiatif dalam kerangka IORA yang akan diinput sebagai *Code of Conduct* dalam IORA Concord antara lain: (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2014, p. 88)

- a. Merevitalisasi *Indian Ocean Tourism Organization* (IOTO), karena pada tataran pelaksanaannya, organisasi ini belum banyak berkontribusi aktif dalam agenda-agenda IORA. IOTO saat ini berlokasi di Oman. Apabila Indonesia serius untuk mempromosikan sektor pariwisata, diusulkan untuk memindahkan IOTO ke Indonesia, misalnya di Bali.
- b. Mendorong kerjasama yang bersifat *intra-regional tourism* yang dapat mendorong peningkatan jumlah wisatawan, seperti *journalist exchange³ visit, joint tourism promotion* diantaranya dalam bentuk

IORA Travel Mart, menciptakan keijakan/fasilitas visa pariwisata untuk Negara-negara anggota IORA, pertukaran informasi, dan *sharing best practice*.

- c. Mendorong *ocean tourism* dan *religious tourism* sebagai tema bersama karena adanya keterkaitan budaya antar negara-negara anggota IORA.
- d. Mendorong partisipasi aktif sektor swasta di bidang pariwisata di negara-negara anggota IORA untuk dapat melakukan kerjasama, misalnya membuat paket-paket wisata bersama.
- e. Mendorong peningkatan kapasitas pemeliharaan warisan budaya dalam pendirian *Indian Ocean Rim World Heritage Conservation* dengan aktivitas seperti pelatihan, pertukaran informasi, dan pameran.
- f. Memanfaatkan beasiswa kebudayaan yang telah dimiliki oleh Indonesia untuk dialokasikan secara khusus kepada Negara-negara di lingkungan Samudera Hindia. Apabila terdapat kendala keterbatasan anggaran, dapat memanfaatkan beasiswa program non-IORA yang diasosiasikan sebagai kegiatan IORA. Misalnya Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) pada tahun 2015-2017, dapat dikemas dengan sedemikian rupa dengan melibatkan Negara-negara anggota IORA
- g. Mendorong peningkatan konektivitas laut dan udara diantara negara-negara anggota IORA untuk memudahkan arus kunjungan wisatawan dari negara-negara tersebut.

Semua inisiasi Indonesia ini akan diadopsi menjadi *code of conduct* yang akan di tawarkan oleh Indonesia dengan tujuan agar kedepan IORA dapat dijalankan dengan lebih baik lagi terutama dalam menghadapi masalah dan tantangan baru khususnya di kawasan Samudera Hindia. *Code of Conduct ini* akan di tampilkan oleh Indonesia dalam IORA Concord yang akan dilaksanakan pada bulan Maret di Jakarta Convention Centre. Keseluruhan gagasan dari 6 agenda prioritas IORA ini

diajukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) untuk mengubah kegiatan-kegiatan IORA yang selama ini bersifat *project based* menjadi suatu yang lebih strategis. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi dari organisasi internasional yaitu sebagai Sentralistik, dimana organisasi internasional ini dapat menjadi pendukung interaksi antar Negara sehingga dapat berpengaruh terhadap kapabilitas, pemahaman, dan kepentingan dari suatu negara. Indonesia akan mendorong IORA untuk lebih berani mengambil langkah strategis, misalnya dengan mengelola Samudera Hindia untuk kepentingan bersama. Bagi Indonesia, memiliki peran penting untuk membangun stabilitas regional di Samudera Hindia tidak hanya dengan menghadirkan kekuatan militer, namun juga dengan turut membangun norma, prinsip, kelembagaan, dan mekanisme pengelolaan konflik. Sehingga Samudera Hindia dapat menjadi kawasan yang aman untuk melakukan aktifitas kelautan.

Selama Indonesia resmi menjadi Ketua IORA pada tahun 2015 dimana 2 tahun sebelumnya saat Pertemuan Tingkat Menteri di Perth, Australia, Indonesia mendampingi Australia menjadi Wakil Ketua. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya Sistem kepemimpinan di IORA adalah Estafet dari wakil ketua yang pernah di emban sebuah Negara pada periode sebelumnya. Indonesia menjabat dalam Organisasi Regional ini selama 2 tahun yaitu 2015 – 2017.

Dalam menjalankan kepemimpinannya di IORA Indonesia mengusung tema *Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean*, Indonesia merupakan negara pertama yang mempunyai tema dalam menjalankan kepemimpinan di IORA. Tema yang di usung ini merupakan salah satu penjabaran dari Visi Pemerintahan Jokowi yang tertuang dalam Nawacita.

Indonesia menaruh perhatian serius pada organisasi regional ini. Bentuk keseriusan tersebut ditunjukkan dengan penugasan seorang pejabat senior dari Kementerian Luar Negeri RI, Sdr. Firdaus Dahlan, sebagai salah satu direktur pada

sekretariat IORA. *Secondmen* tersebut melengkapi formasi direktur di Sekretariat IORA, yang saat ini hanya diisi oleh Mr. H Graham Anderson asal Afrika Selatan. (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2014, p. 12)

Berbagai pertemuan dan pelatihan penting yang telah diadakan dan menghasilkan kesepakatan penting untuk IORA dalam 3 tahun terakhir, antara lain:

1. Kegiatan pada tahun 2014:
 - Renewable Energy Ministerial Meeting, 21 Januari 2014 di Abu Dhabi
 - Conference on the Political Economy of Maritime Africa in the Indian Ocean Region, 12 – 14 Maret 2014 di Nairobi, Kenya
 - Tourism Ministerial Meeting, di Seychelles
 - Indian Ocean Dialogue (IOD), 5 – 7 September 2014 di Kochi, India
 - Rangkaian 14th Council of Ministers Meeting (COMM), 9 Oktober 2014 di Perth, Australia
2. Kegiatan pada tahun 2015:
 - Working Group of Heads of Mission (WGHM), 24 Februari 2015 di Afrika Selatan
 - IORA Blue Economy Core Group on Promoting Fisheries and Aquaculture and Maritime Safety and Security Cooperation in the Indian Ocean Regional, pada 4 – 5 Mei 2015 di Durban, Afrika Selatan
 - The 2nd Indian Ocean Rim Association Tourism Expert Meeting (IORA-TEM), 9 Mei 2015 di Durban, Afrika Selatan
 - The First IORA Ministerial Conference on the Blue Economy, 2 – 3 September 2015 di Port Louis, Mauritius

- The 2nd Indian Ocean Dialogue (IOD-II), 5 – 7 September 2015 di Perth, Australia
- Rangkaian 15th Council of Ministers and Its Related Meetings, pada 20 – 23 Oktober 2015, di Jakarta dan Padang.

IORA terdiri dari 21 Negara yang mencakup sekitar 2,7 Miliar penduduk atau 35 % dari total penduduk dunia. Tetapi perannya baru 12 % dari pangsa pasar dunia, 10 % dari produk domestik global, dan 13 % dari penanaman modal asing. Selain itu, sebesar 96 % perdagangan intra – IORA dikuasai enam Negara yaitu Singapura, Malaysia, India, Indonesia, Australia dan Afrika Selatan. Didominasi enam negara tersebut mengakibatkan pertumbuhan perdagangan Intra – IORA berjalan lambat. IORA terdiri dari 21 negara yang mencakup sekitar 2,7 miliar penduduk atau 35 persen dari total penduduk dunia. Tetapi perannya baru 12 persen dari pangsa pasar dunia, 10 persen dari produk domestik bruto global, dan 13 persen dari penanaman modal asing," kata Enggartiasto dalam konferensi pers, di Jakarta. Selama 21 tahun, perdagangan intra-regional IORA hanya tumbuh 3,3 kali lipat, yakni 233 miliar dollar AS pada 1994 menjadi 777 miliar dollar AS pada 2015. Padahal, Samudera Hindia merupakan 70 persen jalur perdagangan dunia, termasuk jalur distribusi minyak dan gas (migas).

Lebih dari setengah kapal kontainer dan dua per tiga kapal tanker minyak dari seluruh dunia melewati kawasan ini. Atas dasar itu, dalam IORA Summit 2017 nanti Indonesia menargetkan peningkatan perdagangan dan investasi, utamanya antar negara berkembang.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong, dalam 10 tahun terakhir ini terjadi perubahan besar dalam hal arus modal. "Fokus pada kerja sama selatan-selatan. Kalau dulu investasi umumnya banyak datang dari negara maju ke negara berkembang. Tetapi 10 tahun ini banyak investasi antar negara berkembang.